

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk memperluas pilihan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif merumuskan arah dan tujuan pembangunan sehingga manusia berperan sebagai titik sentralnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan agar dapat mempertinggi partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Peningkatan kualitas SDM menjadi arah bagi pemberdayaan masyarakat dalam mencapai produktivitas yang tinggi sehingga dapat menjadi daya pendorong bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, SDM yang berkualitas merupakan potensi dalam penyediaan faktor produksi untuk menghasilkan produk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM tersebut dapat ditempuh melalui perbaikan aspek fisik, sosial ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan mutu atau kualitas dalam pendidikan dan pelatihan. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat melalui partisipasinya dalam pembangunan.

Kinerja pembangunan SDM, dapat dilihat antara lain melalui perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM berguna untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia

dan sekaligus merupakan alat ukur bagi keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Penyusunan IPM merujuk pada aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam empat indikator utama yaitu (i) *angka harapan hidup*, (ii) *angka melek hurup*, (iii) *rata-rata lama sekolah*, dan (iv) *paritas daya beli*.

Berdasarkan laporan kompas 2004 yang menyatakan bahwa secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas manusia di Negara-negara lain di dunia. *Human Development Report 2004* yang menggunakan data tahun 2002, menyatakan bahwa angka IPM Indonesia adalah hanya 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek hurup penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan pendapatan domestik bruto perkapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US\$ 3.230. IPM Indonesia tersebut hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Ima R.Mardiah, 2006:3)

Pembangunan manusia sampai saat ini masih dianggap sebagai inti dari setiap pembangunan, mengapa demikian? karena dengan peningkatan pembangunan manusia (meningkatnya kualitas SDM) dimungkinkan akan mampu menunjang bagi peningkatan pembangunan sektor lainnya, selain itu juga melalui peningkatan kualitas SDM ini akan memungkinkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Banyak pendapat yang mencoba membuktikan bahwa

kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu Negara. Pada tahun 1965, **Harbinson** dan **Meyers** dalam bukunya *Manpower and Education: Country Studies in Economic Development*, menyatakan bahwa "*In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacities of its people*". Peningkatan kualitas SDM tersebut hanyalah dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena sampai saat ini pendidikan diakui sebagai suatu investasi SDM yang dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas (Nanang Fatah, 2004:78). Sementara itu berkaitan dengan hal tersebut, **Ben Moris** (dalam Idochi Anwar, 2004:128) mengungkapkan beberapa manfaat pendidikan terhadap pembangunan manusia antara lain; *(1) education as the discovery of what is means to be human, (2) education as a transmittion between the generation, (3) education as the nourishment of persons*. Pandangan yang dikemukakannya tersebut jelas memandang pendidikan sebagai fungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak.

Salah satu sektor kehidupan manusia yang perlu disoroti dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan ialah sektor ekonomi, mengapa demikian? karena antara sektor pendidikan dan sektor ekonomi ini memiliki keterkaitan erat dan masih dipandang sebagai landasan bagi pembangunan sektor lainnya, bahkan dewasa ini banyak ahli ekonomi yang berupaya mengemukakan tingkat kontribusi

pendidikan terhadap perkembangan ekonomi. Ahli ekonomi yang terkenal yaitu Adam Smith dan Alfred Marshall misalnya, mengemukakan keyakinannya bahwa *“the most valuable of all capital is that invested in human beings”*. Pandangan ini sebagai suatu bukti yang memberikan pengakuan terhadap peranan human investmen dalam kehidupan manusia, karena berbicara mengenai investasi manusia jelas tidak boleh lepas dari fungsi pendidikan (Idochi Anwar, 2004:128)

Merujuk dari asumsi tersebut, dewasa ini sejalan dengan tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mandiri dan bertanggung jawab diperlukan kontribusi masyarakat atau SDM daerah yang berkualitas dan mampu mendayagunakan sumber daya alam daerah secara efektif dan efisien bagi kemakmuran rakyatnya. Sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari pembangunan (Moch. Manshur H. dkk, 1999:1). Maka dari itu upaya peningkatan SDM perlu terus ditingkatkan yang salah satunya adalah dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas dari pendidikan tersebut. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM. Pendidikan berpengaruh secara kuat terhadap perekonomian suatu bangsa, hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan SDM lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dalam lingkungannya. Oleh karena itu tidaklah heran apabila Negara yang memiliki penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat

(Nanang Fatah, 2004:77). Hal ini juga sesuai dengan tujuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) No. 2 tahun 1989 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari uraian-uraian diatas sangatlah jelas bahwa kontribusi pendidikan yaitu memiliki peran dan fungsi dalam pengembangan atau peningkatan pembangunan sektor kehidupan lainnya. Dengan adanya kejelasan mengenai peranan dan fungsi pendidikan, maka permasalahan selanjutnya ialah bagaimana pendidikan itu berfungsi seoptimal mungkin daripada sektor lainnya tersebut. Dalam hubungan inilah kedudukan pendidikan dapat dipandang sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan sektor lainnya. Pandangan pendidikan sebagai subjek pembangunan mempunyai implikasi bahwa hasil dan proses pendidikan itu kelak akan menjadi pelaksana pembangunan sektor kehidupan manusia lainnya, hal ini dapat berkonotasi bahwa pendidikan benar-benar dapat “menyiapkan” manusia yang diperlukan baik dari segi jumlah (*kuantitas*) maupun dari segi mutu (*kualitas*).

Pandangan yang kedua melihat pendidikan sebagai objek pembangunan, memberi arti bahwa pendidikan itu sendiri menjadi sasaran untuk dibangun, agar kelak dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan harapan yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan

kebutuhan pada sektor kehidupan lainnya. Meningkatnya kebutuhan tersebut dapat disebabkan oleh adanya kemajuan (*progress*) atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *natural*, misalnya oleh pertumbuhan usia anak sekolah.

Berperannya pendidikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Maka dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan inilah muncul permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan, karena dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan biaya yang harus dikorbankan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti yang diungkapkan R. Sadikin (2000:2) “upaya pemerintah (Depdiknas) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengimbangi kemajuan IPTEK dan globalisasi dewasa ini, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah telah dirumuskan dalam empat kebijakan atau strategi yang terdiri:

- a. Perluasan kesempatan belajar
- b. Relevansi pendidikan
- c. Peningkatan mutu pendidikan
- d. Efektivitas dan efisiensi, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional (butir-butir Rapat Kerja Nasional Depdikbud)

Seperti halnya permasalahan yang selama ini terjadi, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sangat terkait dengan keterbatasan pendidikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun dalam USPN tersebut

telah dijelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun hal itu tertahan oleh keterbatasan biaya yang harus disediakan, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan dari pendidikan ini. Kebutuhan akan dana pendidikan setiap sekolah atau untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) misalnya, semakin meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan IPTEK dan sarana prasarana yang harus disediakan dalam meningkatkan kualitas yang harus diberikan. Tapi yang pasti, kita dihadapkan pada keterbatasan dana yang tersedia atau disediakan untuk pendidikan. Hal ini disebabkan oleh semakin terpuruknya perekonomian dan karena persaingannya dengan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, meskipun dalam tataran konsep beberapa tahun terakhir ini pemerintah dituntut untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% tapi kenyataannya sampai saat ini belum bisa diralisasikan. Maka untuk menanggulangi keterbatasan dana tersebut setiap institusi atau lembaga pendidikan melakukan upaya mencari sumber-sumber baru bagi pembiayaan pendidikan disamping berupaya terus untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan agar dana yang tersedia itu dapat digunakan secara maksimal dan efektif guna mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.

Nanang Fatah (2005:141) menyatakan bahwa “ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya, seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang mampu

menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan darimana dana itu diperoleh dan untuk apa dana tersebut dikeluarkan”.

Karena cukup besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Darimana sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh, bagaimana pengelolaannya dan manfaat apa yang bisa diperoleh dari penggunaan dana tersebut.

Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, upaya untuk menggunakan dana yang tersedia secara tepat, untuk suatu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat dihindarkan, *inhaeren pada hasil dan dapat diduga sebelumnya* adalah salah satu usaha untuk menempatkan biaya pendidikan yang tepat dan sebanar-benarnya. Sehingga akan terlihat secara langsung pengaruhnya terhadap kuantitas ataupun kualitas hasil pendidikan.

Pentingnya studi pembiayaan dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan ditegaskan oleh **Koe L. John** dan **L Morphet** dalam (Idochi Anwar, 2004:122) sebagai berikut:

“When the quantity or the quality of education increased financial generally needs to be increased. When the financial support is restricted, the quantity and the quality of education are likely to be limited”

Penegasan diatas mengisyaratkan bahwa aspek-aspek kuantitas maupun kualitas pendidikan dapat diterangkan dari konsep pembiayaan. Hal ini berarti bahwa dalam kondisi yang ideal, ketersediaan dana yang memadai dengan manajemen pembiayaan (*manjemen of finance*) yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah ataupun kualitasnya.

Sejak dahulu, masalah pemenuhan kebutuhan dana pendidikan dipandang sebagai hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun oleh karena ada keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka ditanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (USPN No. 20 tahun 2003)

Secara sederhana Nanang Fatah mengelompokan dana pendidikan menjadi dua aspek, yaitu :

- 1) Dimensi Penerimaan atau sumber dana, dan
- 2) Dimensi Pengeluaran atau alokasi dana.

Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi: pengeluaran modal/kapital atau anggaran pembangunan (*capital outlay/expenditure*).

Seperti diketahui bahwa sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia untuk setiap lembaga pendidikan diperoleh dari pemerintah dan masyarakat termasuk para orang tua peserta didik (Muddin Said, 1991:2). Demikian pula halnya secara khusus yang ada pada SMA di Kecamatan Jampangkulon, dimana sumber pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah tersebut adalah sumber pembiayaan pendidikan yang telah dianggarkan dalam APBN dan juga dalam undang-undang sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, sementara itu sumber pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa terdiri dari DSPP atau dikenal dengan uang bangunan atau dana tahunan sedangkan sumbangan pembiayaan yang kedua dikenal dengan istilah sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) atau uang bulanan, kemudian ditambah lagi dengan sumbangan sukarela. Sementara besarnya sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa tersebut pada tahun pelajaran 2005/2006 berdasarkan SMA/ Madrasah Aliyah (MA) yang ada di Kecamatan Jampangkulon sampai tahun 2005/2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Nama SMA/MA Di Kecamatan Jampangkulon dan
Besarnya Iuran Yang Bersumber Dari Orang Tua Siswa TA. 2005/2006

No	Sekolah	Jumlah Siswa	SPP (Bulanan)	DSP (Tahunan)
1.	SMA Negeri 1 Jmapngkulon	919	27.500	750.000
2.	SMA Terpadu Darul 'Amal	173	50.000	750.000
3.	MA Nida Bahari	141	25.000	750.000

Sumber: Data Pra Penelitian

Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa SMA yang ada di Kecamatan Jampangkulon sampai tahun 2005/2006 adalah sebanyak 3 SMA. Satu SMA Negeri dan yang dua adalah milik Yayasan atau milik swasta. Sementara

besarnya iuranpun dari ketiga sekolah ini beragam dan nilainya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sekolah sederajat yang ada di perkotaan. Dalam hal penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada permasalahan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa atau lebih tepatnya tentang permasalahan pada SPP.

“SPP yaitu bantuan dana iuran sekolah yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke Kantor Dinas Pendidikan. Biasanya besar kecilnya SPP telah ditentukan oleh kantor wilayah setempat untuk setiap tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK). Sebagian dana SPP ini dikembalikan lagi ke sekolah dalam bentuk Dana Penunjang Pendidikan atau Sumbangan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (DPP/SBPP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam bentuk sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar (KBM)” (Nanang Fatah, 2005:145).

Meskipun sumber dana ini dikenal dengan nama sumbangan namun dalam pelaksanaannya sumber ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh orang tua siswa untuk membayar hak yang diterima oleh anaknya dalam rangka menempuh pendidikan di sekolah dan pada akhirnya sampai saat ini dampak tersebut sangat besar bagi kelancaran proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Dimana permasalahan yang terjadi dan menuntut penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu besarnya tunggakan atau angka penangguhan pembayaran SPP baik dari jumlah siswa yang melakukan penangguhan ataupun besarnya tunggakan secara nominal nilai rupiah, yang pembayarannya ditunda atau tidak mampu dibayar oleh Siswa SMA/MA di Kecamatan Jampangkulon setiap bulan tepat pada waktunya selama tahun pelajaran 2005/2006 yaitu sejak bulan Juli 2005 s.d bulan Juni 2006, dengan demikian berarti masih rendahnya loyalitas siswa SMA di Kecamatan Jampangkulon dalam membayar SPP. Bahkan

dari data pra penelitian yang penulis peroleh bahwa selama tahun pelajaran tersebut terdapat 13 Siswa di SMAN 1 Jampangkulon yang terpaksa harus putus sekolah (*Drop Out*) yang salah satu faktor penyebabnya adalah karena masalah ketidakmampuan siswa/orang tua siswa dalam membayar SPP ke sekolah. Adapun jumlah siswa SMA yang melakukan penunggakan SPP di Kecamatan Jampangkulon selama tahun pelajaran 2005/2006 tersebut adalah lebih jelasnya seperti dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Siswa SMA di Kecamatan Jampangkulon Yang Melakukan Penangguhan Pembayaran SPP Selama Tahun Pelajaran 2005/2006

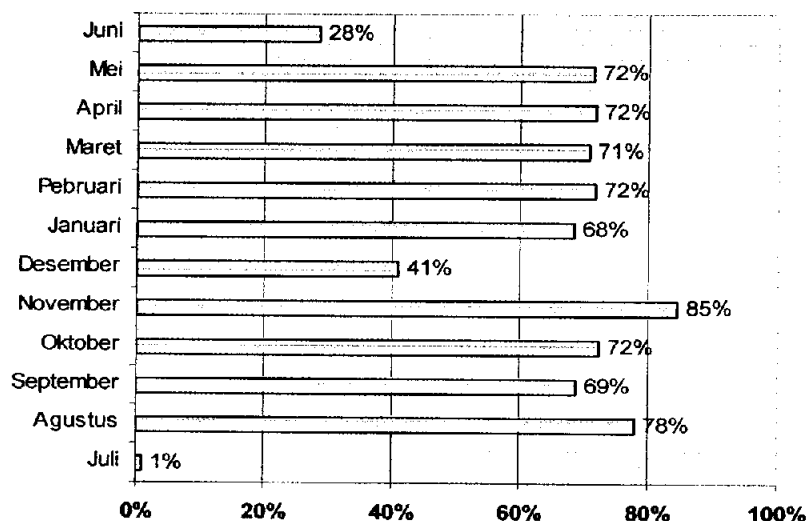
No	Bulan	SMAN 1 Jampangkulon	SMA T Darul 'Amal	MA NIDA Bahari	Jumlah	Rata-rata (%)
1	Juli	2	6	6	14	1%
2	Agustus	708	129	127	864	78%
3	September	616	127	104	847	69%
4	Oktober	652	117	123	892	72%
5	November	763	147	133	1043	85%
6	Desember	307	108	90	505	41%
7	Januari	578	135	131	844	68%
8	Pebruari	641	126	117	884	72%
9	Maret	642	118	112	872	71%
10	April	644	128	114	886	72%
11	Mei	654	115	113	882	72%
12	Juni	209	56	85	350	28%
Rata-rata		535	109	105	749	
Persentase		58%	63%	74%		61%

Sumber : Data Pra Penelitian dan di olah

Keterangan

Total Jml Siswa = 1233 Orang

Tepat = Membayar SPP maksimal tanggal 10 setiap bulannya



Gambar 1.1
Siswa SMA di Kecamatan Jampangkulon Yang Melakukan Penangguhan
Pembayaran SPP Tahun Pelajaran 2005/2006

Tabel 1.2 diatas merupakan data jumlah siswa yang melakukan tunggakan/penangguhan atau tidak mampu membayar SPP setiap bulan tepat pada waktunya selama tahun pelajaran 2005/2006 pada tiga sekolah yang menjadi objek penelitian penulis. Jumlah rata-rata tunggakan pada masing-masing sekolah tersebut adalah: SMAN 1 Jampangkulon sebanyak 535 orang siswa (58 %) atau senilai Rp 14.712.500,00 setiap bulannya yang berarti siswa yang mampu membayar tepat pada waktunya yaitu hanya 42% dari jumlah siswa sebanyak 919 orang. SMAT Darul 'Amal 109 orang (63%) atau senilai Rp 5.450.000,00 dan yang mampu membayar berarti hanya 37% dari jumlah siswa sebanyak 173 orang. Kemudian untuk MA Nida Bahari rata-rata tunggakan perbulannya adalah 105 orang (74%) atau sebesar Rp 2.625.000,00 atau hanya 25% siswanya yang mampu membayar iran SPP tepat pada waktunya. Sedangkan gambar 1.1 melengkapi penjelasan rata-rata jumlah siswa dari ketiga sekolah diatas yang melakukan

penangguhan SPP setiap bulan selama tahun pelajaran 2005/2006. Adapun tabel dan gambar mengenai jumlah siswa yang memiliki loyalitas untuk mampu membayar SPP tepat pada waktunya atau selalu membayar SPP sebelum tanggal 10 setiap bulannya tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

Meskipun kalau dilihat secara perbulan, siswa yang melakukan penangguhan/penunggakan tersebut jumlahnya berfluktuatif. Besarnya nilai penangguhan tersebut akan mengganggu kelancaran dalam pembiayaan dan proses penyelenggaraan pendidikan. Padahal kebutuhan dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut jauh lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh sekolah baik dari DSPP (dana tahunan) ataupun dari SPP (dana bulanan), terlebih lagi pada sekolah swasta yang notabene pembiayaan penyelenggaraan pendidikannya sangat mengandalkan sumber penerimaan yang berasal dari orang tua siswa dan jumlah siswanya sendiri jauh lebih sedikit sedangkan nilai tunggakannya malah lebih besar bila dibandingkan dengan sekolah negeri, sebagai contoh SMAT Darul 'Amal dalam laporan kas komitenya menunjukkan bahwa tunggakan SPP yang belum dibayar oleh siswa sampai akhir tahun pelajaran 2005/2006 adalah sebesar Rp 1.831.000,00. sehingga pemenuhan keutuhan dana tersebut akhirnya harus dilakukan dengan menggali sumber dana lain yaitu dari yayasan, donatur termasuk pinjaman. Hal itu juga seperti yang terjadi pada SMAN 1 Jampangkulon, yang mana sampai akhir tahun pelajaran 2005/2006 dalam buku laporan kas komitenya tercatat, bahwa utang dari dana pinjaman tersebut masih belum mampu dibayar oleh sekolah sebesar Rp 27.950.250,00.

Ketidakmampuan siswa dalam melunasi SPP tepat pada waktunya ini diindikasikan sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga dan juga karena faktor kebijakan sekolah dalam menarik SPP tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada awal dan akhir tahun pelajaran yaitu pada bulan Juli dan bulan juni, Jumlah siswa yang tidak membayar SPP pada bulan Juli, khusus untuk SMAN 1 Jampangkulon hanya 2 orang atau hanya sebesar 0,44% dari jumlah siswa seluruhnya. Hal ini dikarenakan bahwa pada bulan Juli merupakan awal tahun pelajaran atau awal masuk sekolah, yang mana siswa kelas 1 merupakan siswa yang baru masuk sedangkan kelas 2 dan kelas 3 juga merupakan awal masuk dikelas barunya. Adapun kebijakan SMA di Kecamatan Jampangkulon dan mungkin juga merupakan kebijakan di setiap sekolah bahwa saat memasuki tahun pelajaran baru, semua siswa diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang dengan syarat melunasi SPP untuk bulan Juli. Sehingga hampir semua orang tua siswa terpaksa harus menyisihkan uangnya untuk membayar SPP agar anaknya bisa melakukan registrasi dan tetap bisa melanjutkan sekolah. Sementara untuk bulan Juni, merupakan bulan akhir tahun pelajaran dimana jumlah siswa yang melakukan penangguhan SPP juga lebih kecil daripada bulan-bulan yang lainnya, hal ini karena setiap pada akhir tahun pelajaran semua siswa diwajibkan untuk melunasi SPP terlebih dahulu sebagai syarat mereka memperoleh buku laporan pendidikan (*raport*) dan bukti kenaikan kelas ataupun juga memperoleh surat tanda kelulusan dan STTB bagi kelas XII. Namun demikian hal tersebut beda halnya dengan 2 sekolah milik yayasan yang masuk dalam penelitian penulis, bahwa untuk awal tahun pelajaran dan juga untuk akhir tahun pelajaran jumlah

penunggakannya masih juga sangat besar. Untuk bulan juli 2005 dan Juni 2006, masing-masing sekolah adalah SMAT Darul 'Amal 57,86% dan 14,46% sedangkan untuk MA Nida Bahari adalah 36,17% dan 52,48. Padahal siswa mereka jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan SMAN 1 Jampangkulon.

Pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa secara umum adalah berasal dari orang tua siswanya itu sendiri meskipun karena adanya faktor paksaan kebijakan sekolah dalam memungutnya. Sehingga loyalitas siswa dalam membayar SPP sangat tergantung pada keberadaan atau kemampuan orang tuanya. Dalam hal ini kemampuan orang tua siswa dalam membayar SPP tersebut secara umum juga sangat ditentukan oleh status sosial ekonomi dari orang tua siswa itu sendiri, yang mana dalam kelompok masyarakat ditemukan wujudnya antara lain; kelas sosial ekonomi tinggi, menengah, rendah dan miskin. Dari status-status tersebut dapatlah kita asumsikan bahwa status sosial ekonomi masing-masing anggota kelompok masyarakat tersebut turut mempengaruhi cara berfikir, berperilaku dan bertindak serta sikap atau kepribadiannya diantara kelompok masyarakat lain dalam kehidupan sehari-harinya.

Aspek yang disebutkan diatas, dapat dilihat dalam berbagai kenyataan bahwa anggota sosial ekonomi tertentu akan menempati lingkungan sosial ekonomi tertentu pula. Dalam arti luas bahwa, jika seorang siswa (dalam hal ini siswa SMA di Jampangkulon) yang berasal dari sebuah keluarga yang status sosial ekonominya lebih baik, maka dapat diasumsikan siswa bersangkutan akan dapat mengekspresikan diri dalam gaya hidup sehari-harinya serta akan mampu membayar iuran SPP bulanan tepat pada waktunya.

Status sosial ekonomi dalam terminologi umum, seperti yang dikatakan oleh **Krech** ialah "...ia merupakan kedudukan seseorang dalam kelompoknya, dan dapat menentukan peran orang tersebut didalam lingkungannya" (**Hadis Suryanto, 1997:2**). Terminologi **Krech** ini dapat diinterpretasikan secara bebas bahwa siswa yang berasal dari kalangan yang orang tuanya berada pada status sosial ekonomi yang lebih baik akan melahirkan suatu kecenderungan; bahwa siswa tersebut akan mampu berperan atau bisa membayar iuran pendidikan dengan baik pula, dalam hal ini yaitu akan mampu membayar SPP setiap bulan tepat pada waktunya.

1.2 Identifikasi Masalah

Karena luasnya masalah dimensi status sosial ekonomi sehingga menyulitkan kita untuk melacaknya, maka disini perlu mencermati berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh para ahli. Indikator penentu tingkat sosial ekonomi keluarga tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, **Krech** memberikan indikator status sosial ekonomi pada aspek-aspek pekerjaan, tingkat pendidikan dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh keluarga yang bersangkutan (Hadis Suryanto, 1997 : 3).

Kedua, **Warner** memberikan indikator sosial ekonomi keluarga pada segi-segi pekerjaan, pendapatan, jenis rumah tempat tinggal keluarga, dan daerah tempat tinggal mereka (Arif, dalam Suryanto 1997 : 3).

Ketiga, Miller memberikan indikatornya pada segi-segi jenis pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendidikan dan jumlah kekayaan mereka (Sulastri, dalam Suryanto 1997 : 3)

Dengan adanya pendapat para ahli beserta indikator yang dikemukakannya diatas menunjukkan substansi pemikiran yang sama, maka peneliti hanya akan menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui tingkat status sosial ekonomi keluarga siswa yang mempengaruhi loyalitas siswa dalam membayar SPP di Kecamatan Jampangkulon ini. Adapun indikator yang akan diteliti tersebut antara lain Tingkat pendapatan orang tua, Jumlah kekayaan yang dimiliki orang tua, dan Tingkat pendidikan orang tua. Sedangkan untuk indikator Jenis pekerjaan orang tua meskipun akan tetap diteliti namun penulis tidak akan memasukannya kedalam kerangka dan model penelitian. Selengkapnya Judul penelitian yang akan penulis angkat adalah **“Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Loyalitas Siswa Dalam Membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). (Studi Kasus Pada SMA di Kecamatan Jampangkulon Tahun Pelajaran 2005/2006)**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan indikator status sosial ekonomi yang telah ditetapkan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran pembiayaan SPP yang terjadi pada SMA di Kecamatan Jampangkulon, khususnya pada tahun pelajaran 2005/2006?

2. Bagaimanakah pengaruh pendapatan orang tua, kekayaan orang tua, dan pendidikan orang tua siswa secara simultan terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP?
3. Bagaimanakah pengaruh pendapatan orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP?
4. Bagaimanakah pengaruh kekayaan yang dimiliki orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP?
5. Bagaimanakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan SPP yang harus dibayar oleh siswa pada SMA di Kecamatan Jampangkulon, khususnya pada tahun pelajaran 2005/2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan orang tua, kekayaan orang tua, dan pendidikan orang tua secara simultan terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP pada SMA di Kecamatan jampangkulon dan implikasinya terhadap pembayaran SPP tahun-tahun pelajaran berikutnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kekayaan orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan orang tua terhadap loyalitas siswa dalam membayar SPP

1. 4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan.

1.4.2.1 Kegunaan Ilmiah

1. Menambah pengetahuan lebih jauh tentang pengaruh status sosial ekonomi keluarga yang diukur dengan indikator pendapatan orang tua, kekayaan orang tua dan pendidikan orang tua terhadap loyalitas siswa SMA dalam membayar SPP, khususnya pada SMA di Kecamatan Jampangkulon yang menjadi objek penelitian penulis.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan khususnya berkenaan dengan pengendalian sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh siswa, yaitu bagaimana menekan jumlah tunggakan dan meningkatkan loyalitas siswa dalam membayar SPP atau dengan cara apakah yang bisa digunakan untuk menggali sumber-sumber penerimaan lain guna menutupi defisit

penerimaan dari orang tua siswa sehingga proses pendidikan tetap dapat berjalan dan terselenggara dengan baik.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Untuk meneliti lebih jauh tentang tingkat loyalitas siswa dalam membayar SPP sehubungan dengan masih besarnya angka tunggakan/penangguhan pembayaran SPP yang harus dibayar oleh siswa SMA di Kecamatan Jampangkulon setiap bulannya selama tahun pelajaran 2005/2006. Serta mengetahui bagaimana pengaruh status sosial ekonomi keluarga yang diukur dengan menggunakan alat ukur indikator pendapatan orang tua, jumlah kekayaan orang tua, dan pendidikan orang tua dalam mempengaruhi loyalitas siswa dalam membayar SPP setiap bulannya tersebut, yang mana indikator tersebut selama ini dianggap sebagai faktor yang paling dominan dari status sosial ekonomi keluarga dalam mempengaruhi loyalitas siswa untuk membayar SPP tersebut.

